SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOPPENG

HIMPUNAN RISALAH RAPAT

No. : 25/HR/DPRD/XII/2025



PENYAMPAIAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SOPPENG

dprd@soppeng.go.id
dprd-soppeng.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

ANOTASI HIMPUNAN RISALAH RAPAT
No. 25/ANOTASI/RISALAH/DPRD/XII/2025

PENYAMPAIAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SOPPENG

A. Latar Belakang

Himpunan risalah ini mendokumentasikan proses legislasi terkait penyampaian hasil kajian Bapemperda terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng. Dasar utama rangkaian rapat ini adalah hasil kerja Bapemperda yang dituangkan dalam Surat Nomor: 15/BAPEM.DPRD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran kronologis dan yuridis mengenai pemenuhan tahapan formil sesuai Tata Tertib DPRD, guna memastikan bahwa Ranperda tentang RPPLH 2025-2055, Penanggulangan Bencana, Ekonomi Kreatif, dan SPBE telah dikaji secara mendalam sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

B. Rangkaian Rapat:

1. Rapat Pimpinan DPRD Membahas Surat Bapemperda Nomor: 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian Bapemperda, pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, Pukul 11.10 – 11.20 WITA di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 115/RISALAH/DPRD/X/2025).
   - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD Kab. Soppeng) dan dihadiri oleh 2 pimpinan DPRD.
   - Ringkasan Rapat : Membahas dokumen hasil kajian dari Bapemperda dan merekomendasikan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk segera mengagendakan rapat paripurna penyampaian hasil kajian tersebut.
   - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap (Risalah rapat dengan lampiran Undangan dan Daftar Hadir). Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat dan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.

2. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Membahas Penjadwalan Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda, pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, Pukul 10.00 – 10.05 WITA di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 117/RISALAH/DPRD/X/2025).
   - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S. Sos (Ketua DPRD/Ketua Bamus) dan dihadiri oleh 2 pimpinan serta 9 anggota Bamus.

- Ringkasan Rapat : Menetapkan jadwal Rapat Paripurna pada hari yang sama pukul 13.00 WITA. Terjadi penyesuaian jadwal dari rencana semula guna efisiensi waktu pelaksanaan agenda legislasi.
- Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap. Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat dan telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.

3. Rapat Paripurna DPRD Terkait Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terhadap 4 (Empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD, pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, Pukul 14.11 – 14.37 WITA di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 119/RISALAH/DPRD/X/2025).
   - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD) dan dihadiri oleh 18 dari 27 Anggota DPRD (Kuorum tercapai).
   - Ringkasan Rapat : Agenda tunggal penyampaian secara resmi dokumen hasil kajian Bapemperda. Pimpinan rapat menyatakan hasil kajian diterima sebagai dasar untuk bersurat kepada Bupati guna tahap pembahasan selanjutnya.
   - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap dalam bentuk risalah verbatim. Telah divalidasi dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta sekretaris rapat.

C. Anotasi dan Analisis Himpunan

1. Verifikasi Teknis dan Kualitas Dokumen
   Berdasarkan audit dokumen terhadap 3 risalah yang terhimpun, diperoleh simpulan sebagai berikut:
   - Seluruh risalah (No. 115, 117, dan 119) telah dinyatakan lengkap secara administratif, mencakup daftar hadir, berita acara, dan catatan rapat yang sinkron satu sama lain.
   - Dokumen telah melalui proses validasi oleh pimpinan rapat dan autentikasi oleh Perisalah Legislatif guna memastikan ketepatan pencatatan waktu dan konsistensi agenda terkait 4 Ranperda Inisiatif tersebut.
   - Rangkaian rapat menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme Pasal 8 Peraturan DPRD Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, di mana setiap tahapan formil telah dilalui secara berjenjang.

2. Catatan Strategis Perisalah
   - Terdapat dinamika akseleratif pada tanggal 22 Oktober 2025, di mana tahapan penetapan jadwal (Bamus) dan pelaksanaan (Paripurna) dilakukan pada hari yang sama. Hal ini menandakan adanya komitmen tinggi DPRD untuk segera mendistribusikan hasil kajian agar proses legislasi tidak terhambat.
   - Risalah mencatat bahwa 4 Ranperda ini (RPPLH, Penanggulangan Bencana, Ekonomi Kreatif, dan SPBE) merupakan inisiatif murni DPRD yang bertujuan memperkuat regulasi lokal di bidang lingkungan hidup, keselamatan warga, ekonomi kerakyatan, dan digitalisasi birokrasi.

- Himpunan risalah ini menjamin kepastian hukum bahwa 4 Ranperda tersebut telah melewati fase penyaringan internal (kajian Bapemperda), sehingga memenuhi syarat formil untuk diproses dalam Pembicaraan Tingkat I selanjutnya.

D. Penutup

Demikian Anotasi Himpunan Risalah Rapat ini disusun sebagai instrumen pendukung dalam sistem dokumentasi dan informasi hukum di DPRD Kabupaten Soppeng. Melalui anotasi ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah menelusuri kembali rekam jejak formil terkait pengusulan 4 Ranperda Inisiatif DPRD Tahun Sidang 2025/2026.

Keberadaan himpunan yang terstruktur ini merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas proses legislasi di daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi pembentukan regulasi yang lebih responsif dan berkualitas.

Penyusun : Sam Aswan, S.E., M.A.P.
NIP. 19860527 200502 1 003,
(Perisalah Legislatif Ahli Madya)

Watansoppeng, 31 Desember 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DPRD SOPPENG

H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19710908 200604 1 006

RAHASIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

CATATAN RAPAT

No. 115/RISALAH/DPRD/X/2025

RAPAT PIMPINAN DPRD
MEMBAHAS SURAT BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 TANGGAL 13 OKTOBER 2025 PERIHAL
HASIL KAJIAN BAPEMPERDA

RAPAT TERTUTUP

RAPAT BERSIFAT RAHASIA

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

RAPAT TERTUTUP

RAPAT BERSIFAT RAHASIA

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 15 Oktober 2025

Nomor : 005/ 429 /DPRD/X/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Pimpinan

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
di
Tempat

Dalam rangka Membahas Surat BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian BAPEMPERDA, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Pimpinan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Jum'at, 17 Oktober 2025
Waktu : Jam 11.00 Wita
Tempat : Ruang Kerja Wakil Ketua II DPRD Kab. Soppeng
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA I DPRD,

H. NASFIDING

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PIMPINAN DPRD

MASA SIDANG KE : I
RAPAT KE : 03
AGENDA : Membahas Surat BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian BAPEMPERDA
HARI / TANGGAL : Jum'at, 17 Oktober 2025
PUKUL : 11.10 s/d 11.20 WITA
TEMPAT : Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA	1.	
2.	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2.	
3.	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.	
4.	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH	SEKRETARIS DPRD	4.	
5.	ANNI RIANI ARSYAD, S. STP., M, Si	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.	
6.	NURRASAK RAHIM ALI, S. Sos	JF. PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	6.	
7.	SAM ASWAN, SE., M. A.P	JF. PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	7.	
8.	FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH	JF, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI MUDA	8.	

CATATAN :
* HADIR
* TIDAK HADIR :

KETUA RAPAT,

H. NASFIDING

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812,
Laman: https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el: dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 13 Oktober 2025

Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Kajian Bapemperda

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng
di
Tempat

Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, bahwa ***"Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna"***, maka dengan itu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (inisiatif DPRD) tentang :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan
4. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda bersama Tim Penyusun Ranperda dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda serta Konsultasi Publik, dan untuk tahapan selanjutnya dibahas sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

KETUA BAPEMPERDA,

HAERUDDIN TAHANG, S.E

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

RAHASIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

CATATAN RAPAT

NOMOR : 117/RISALAH/DPRD/X/2025

RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG MEMBAHAS JADWAL RAPAT DPRD TERKAIT SURAT BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 TANGGAL 13 OKTOBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA

RAPAT TERTUTUP

RAPAT BERSIFAT RAHASIA

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

RAPAT TERTUTUP

RAPAT BERSIFAT RAHASIA

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

2. Peserta Rapat menyepakati Perubahan Rancangan Jadwal Rapat yaitu:
   - Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang semula dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 pukul 10.00 WITA dipindahkan ke hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 13.00 WITA.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat-rapat DPRD terkait Surat Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda sebagaimana jadwal terlampir yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Rapat ditutup pukul 10.05 WITA.

KETUA RAPAT,	SEKRETARIS RAPAT,
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	**H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.**
	NIP.19710908 200604 1 006

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 17 Oktober 2025

Nomor : 005/ 432 /DPRD/X/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Badan Musyawarah DPRD

Yth. Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Kab. soppeng
di
Watansoppeng

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2025 terkait Surat BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian BAPEMPERDA, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk menetapkan jadwal rapat terkait agenda tersebut, pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 22 Oktober 2025
Pukul	: 08.30 Wita
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I
Pakaian	: PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPRD/
WAKIL BADAN MUSYAWARAH

H. NASFIDING

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN MUSYAWARAH

MASA SIDANG KE : I
RAPAT KE : 04
ACARA : Membahas Surat BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian BAPEMPERDA
HARI / TANGGAL : Rabu, 22 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 s/d 10.15 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Komisi I DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	K E T U A	1.
2	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2.
3	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.
4	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	4.
5	Hj. ANDI WAHDA, S.E	ANGGOTA	5.
6	SUMARNI	ANGGOTA	6.
7	H. ANDI WADENG, S.E., M.M	ANGGOTA	7.
8	H. KUSMAN, S.E., M.M	ANGGOTA	8.
9	FAUZI ALGIFARY	ANGGOTA	9.
10	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	10.
11	ANDI DEWI AYU LESTARI	ANGGOTA	11.
12	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E	ANGGOTA	12.
13	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	13.
14	ANDI TAKDIR, S.E	ANGGOTA	14.
15	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	15.
16	RUSDIAMAN TAHIR, S.E	ANGGOTA	16.

CATATAN :
* HADIR : 11 orang
* TIDAK HADIR : 4 orang

BADAN MUSYAWARAH
KETUA RAPAT

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

JADWAL RAPAT-RAPAT DPRD SOPPENG

TERKAIT

Surat Bapemperda DPRD Kab. Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian Bapemperda

(Berdasarkan Rapat Pimpinan pada Hari Jum'at, Tanggal 17 Oktober 2025)

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL (Wita)	KEGIATAN	PAKAIAN
1.	**Rabu** 22 Oktober 2025	08.30	**RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD** **Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD** Terkait Surat Bapemperda DPRD Kab. Soppeng Nomor : 15/BAPEM.DPRD/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Hasil Kajian Bapemperda	**PSH**
2.	**Rabu** 22 Oktober 2025	13.00	**RAPAT PARIPURNA DPRD** **Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA** Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	**PSH**

Watansoppeng, 22 Oktober 2025
KETUA BADAN MUSYAWARAH,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.

CATATAN :
1. Diharapkan hadir 15 Menit sebelum rapat dimulai
2. Jadwal Rapat berdasarkan Tatib DPRD :
   a. Senin s/d Kamis :
      Pagi : Pukul 09:00 s/d 12:00 Wita
      Siang : Pukul 13:00 s/d 16:00 Wita
   b. Jumat :
      Pagi : Pukul 08:00 s/d 11:00 Wita
      Siang : Pukul 14:00 s/d 16:00 Wita

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

RISALAH RAPAT

No.119 /RISALAH/DPRD/X/2025

RAPAT PARIPURNA DPRD
PENYAMPAIAN HASIL KAJIAN BAPEMPERDA TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD YAITU RANPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055, RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tahun sidang	:	2025/2026
Masa Persidangan	:	1
Rapat Ke	:	16
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu/ 22 Oktober 2025
Waktu Rapat	:	14.11 – 14.37 WITA
Ketua Rapat	:	H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD Kab. Soppeng)
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Paripurna
Acara	:	Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terhadap 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sekretaris Rapat	:	H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Soppeng)
Hadir	:	A. Pimpinan DPRD Hadir Fisik 1 orang Pimpinan dari 3 orang Pimpinan 1. H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD) B. Anggota DPRD Hadir Fisik 18 orang Anggota dari 27 orang Anggota 1. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar) 2. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Golkar) 3. H. Syahruddin M. Adam, S.Sos., M.M. (Fraksi Golkar) 4. Mursalin, S.E. (Fraksi Golkar) 5. Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si. (Fraksi Golkar) 6. Hj.Insana, S.Pd.SD. (Fraksi Golkar) 7. Abdul Kadir, S.P. (Fraksi Golkar) 8. Kamaruddin, S.E., M.Si. (Fraksi PDI-Perjuangan) 9. Sainal Nur (Fraksi PDI-Perjuangan) 10. Ardi Doma (Fraksi PDI-Perjuangan) 11. Andi Mahfud. S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

12. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S,E. (Fraksi Partai Nasdem)
13. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
14. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)
15. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd. (Fraksi Partai Demokrat)
16. Haeruddin Tahang, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
17. Andi Nelli, S. Pd. (Fraksi Partai Gerindra)
18. Rusdiaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)

C. Pimpinan dan Anggota DPRD Izin (11 orang)
1. H. Andi Muhammad Farid , S.Sos. (Ketua DPRD)
2. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD)
3. H.Ismail (Fraksi Golkar)
4. Hadi Wijaya Ismail, S.P. (Fraksi Golkar)
5. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)
6. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
7. Sumarni (Fraksi Golkar)
8. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI-Perjuangan)
9. H. Syamsuddin Dennu (Fraksi PDI-Perjuangan)
10. Bahtiar Mase (Fraksi Partai Nasdem)
11. Syahrir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)

D. Sekretariat DPRD
1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Soppeng)
2. Anni Riani Arsyad, S.STP., M.Si. (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan)
3. Nurrasak Rahim Ali, S.Sos. (JF. Perisalah Legislatif Ahli Madya)
4. Sam Aswan, S.E., M.A.P. (JF. Perisalah Legislatif Ahli Madya)
5. Heriani, S.Si., M.M. (JF. Perisalah Legislatif Ahli Muda)

JALANNYA RAPAT :

(RAPAT DIMULAI PUKUL 14.11 WITA)

KETUA RAPAT (H. NASFIDING) :

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat, Wakil Ketua, Teman-teman Rekan-Rekan Anggota Dewan.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD bersama Jajarannya.

Serta Hadirin yang kesemuanya saya hormati.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, marilah kita ucapkan Puji syukur ke-Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda " Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terhadap 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".

Begitu pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW , Nabi pembawa Risalah di muka bumi dan pemberi Syafaat di akhirat kelak. *Amin Ya Robbal alamin*.

Rapat Paripurna yang terhormat.

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah di tandatangani oleh 19 orang Anggota Dewan, menunjukkan bahwa Rapat Anggota Dewan pada hari ini telah mencapai kourum.

Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan "*Bismillahir Rahmanir Rahim*" Rapat Paripurna Dewan pada siang ini, Rabu Tanggal 22 oktober 2025 Pukul 14.11 WITA dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 1 X)

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Alhamdulillah pada hari ini, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, kita akan mendengar Hasil Kajian Bapemperda terhadap 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD, dimana tahapan ini adalah salah satu syarat Ranperda inisiatif DPRD dapat di lanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Pada Pasal 8 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD Dalam Rapat Paripurna.

Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan hasil kajian Bapemperda Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD sebagai Berikut :

(*Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda Terlampir*)

Demikian tadi Kajian Bapemperda yang telah kami sampaikan. Untuk itu, jika sekiranya diantara Fraksi atau Rekan-Rekan ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami beri waktu dan akan ditanggapi nanti oleh Bapemperda. Dengan hormat kami persilahkan.

Tidak Ada Pertanyaan.

Sesaat yang lalu, kami telah menyampaikan Hasil Kajian Bapemperda atas 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan telah pula kami berikan kesempatan kepada Rekan-Rekan untuk membahasnya, maka saya kira sudah cukup.

Untuk itu,saya ingin bertanya kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan yang Terhormat, apakah usulan keempat Rancangan Perda Inisiatif DPRD tersebut, disetujui?

ANGGOTA RAPAT

Setuju.

(KETUKAN PALU 2 X)

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

Terima kasih atas persetujuan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat, selanjutnya akan kami tindak lanjuti dalam bentuk Surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan sesuai Tata Tertib DPRD.

Akhirnya, dengan mengucapkan *"Syukur Alhamdulillah"*, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Rabu Tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 14.37 WITA dengan resmi saya tutup.

(KETUKAN PALU 3X)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.37 WITA)

KETUA RAPAT,	SEKRETARIS RAPAT,
H. NASFIDING	**H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.**
	NIP.19710908 200604 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian/Ketua Tim	

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

Watansoppeng, 22 Oktober 2025

Nomor : 005/ 446 /DPRD/X/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di
Watansoppeng

Dalam rangka Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Pukul : 13.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

MASA SIDANG KE : 1
RAPAT KE : 16
ACARA : Penyampaian Hasil Kajian BAPEMBERDA terhadap 4(Empat)Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang :
1.Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3.Pengembangan Ekonomi Kreatif
4.Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
HARI / TANGGAL : Rabu/ 22 Oktober 2025
PUKUL : 14.11 s/d 19.37 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Kab. Soppeng

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos		L	KETUA DPRD	1. .....
2	H. NASFIDING		L	WAKIL KETUA I DPRD	2.
3	MUHAMMAD TAUFAN		L	WAKIL KETUA II DPRD	3. .....
4	H. KUSMAN, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI I	4. .....
5	ANDI TAKDIR, S.E		L	WAKIL KETUA	5.
6	KAMARUDDIN, S.E., M.Si.		L	SEKRETARIS	6. .....
7	Hj. ANDI WAHDA, S.E.	P		ANGGOTA	7. .....
8	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.		L	ANGGOTA	8. .....
9	MURSALIN, S.E.		L	ANGGOTA	9. .....
10	ANDI MAHFUD, S.Sos.		L	ANGGOTA	10. .....
11	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos.	P		ANGGOTA	11. .....
12	SYAHRIR, S.E.		L	ANGGOTA	12. .....
13	Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.		L	KETUA KOMISI II	13. .....
14	ANDI DEWI AYU LESTARI	P		WAKIL KETUA	14. .....
15	BAHTIAR MASE		L	SEKRETARIS	15. .....
16	H. ISMAIL		L	ANGGOTA	16. .....
17	HADI WIJAYA ISMAIL, S.P.		L	ANGGOTA	17. .....
18	FAUZI ALGIFARY		L	ANGGOTA	18. .....
19	SAINAL NUR		L	ANGGOTA	19. .....
20	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd., M.Pd.		L	ANGGOTA	20. .....
21	ANDI NELLI, S.Pd.	P		ANGGOTA	21. .....
22	H. ANDI WADENG, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI III	22. .....
23	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E.		L	WAKIL KETUA	23. .....
24	RUSDIAMAN TAHIR, S.E.		L	SEKRETARIS	24. .....
25	SUMARNI	P		ANGGOTA	25. .....
26	Hj. INSANA, S.Pd.SD.	P		ANGGOTA	26. .....
27	ABDUL KADIR, S.P.		L	ANGGOTA	27. .....
28	H. SYAMSUDDIN DENNU		L	ANGGOTA	28. .....
29	ARDI DOMA		L	ANGGOTA	29. .....
30	HAERUDDIN TAHANG, S.E.		L	ANGGOTA	30. .....

Catatan :
* Hadir : 19 orang
* Tidak Hadir : 11 orang

KETUA RAPAT,

H.NASFIDING

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812,
Telepon. (0484) 21055, Faximile. (0484) 21076,
Laman : https://dprd-soppeng.go.id, Pos-el : dprd@soppeng.go.id

HASIL KAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

- **Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**
- **Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.**
- **Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**

Berdasarkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Soppeng telah melakukan kegiatan pembahasan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Hasil pembahasan keempat Rancangan Perda tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. LANDASAN YURIDIS

A.1 Dasar Formil/Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan rancangan perda inisiatif DPRD **telah berkesesuaian** dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar formil dan prosedur pembentukan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

A.2 Regulasi yang Terkait Langsung dengan Rancangan Perda

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, **telah berkesesuaian** dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, **telah berkesesuaian** dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, **telah berkesesuaian** dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, **telah berkesesuaian** dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. DASAR MATERIIL/SUBSTANSIAL PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA

Terkait substansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan keempat Rancangan Perda Inisiatif DPRD **telah berkesesuaian** dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah *e-goverment* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hadirnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan transformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Secara jangka panjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terintegrasi, memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta berorientasi pada pengguna seperti dapat meningkatkan akses warga negara terhadap pelayanan publik, pemerataan kualitas pelayanan dan percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat strategis yaitu, membuka ruang penyelenggaraan yang dilaksanakan secara kolaboratif dan sinergi dengan instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengakselerasi pembangunan di segala sektor dengan dukungan sistem elektronik yang berkualitas. Melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memberikan manfaat terhadap pola kerja pemerintahan yang dituntut menjadi birokrasi efektif dan efisien yang diimplementasikan antara lain pada layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan dan administrasi pemerintahan.

Lahirnya suatu kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam bentuk peraturan daerah sangat

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG
Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

diperlukan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai pedoman operasional dan strategis bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pembentukan peraturan daerah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mengorganisasikan kebijakan, memfasilitasi inovasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah di Kabupaten Soppeng.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Soppeng maka diperlukan dukungan berbagai pihak khususnya pada level entitas pimpinan pengambil keputusan dalam bentuk komitmen agar dapat direalisasikan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup diperlukan suatu regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peran strategis RPPLH daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH daerah menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH daerah juga dilengkapi dengan penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada dokumen RPPLH

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

daerah/Provinsi Sulawesi Selatan, dan inventarisasi lingkungan hidup Ekoregion, serta disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim di wilayah Kabupaten Soppeng.

3. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu intervensi pemerintah daerah dalam hal dukungan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan ekosistem, dan dukungan pelaku ekonomi kreatif, serta pelindungan usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal. Pengembangan ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung seperti pembuatan regulasi yang melindungi dan mendorong kreativitas, penyediaan akses modal dan infrastruktur, serta fasilitas kemitraan dan pelatihan yang mendukung kemampuan berkompetisi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Peran sentral pemerintah dalam ekosistem ekonomi kreatif melalui fungsi regulasi dan kebijakan yaitu, membuat peta jalan (*road map*) dan peraturan daerah yang mengatur dan melindungi ekonomi kreatif, dan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi karya kreatif. Pada dukungan akses modal dan infrastruktur, pemerintah berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif, memfasilitasi kemitraan antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan akademisi, serta memberikan akses permodalan dan pembiayaan melalui berbagai skema seperti hibah atau kredit lunak, dan mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya pencatatan dan pendaftaran produk ekonomi kreatif. Adapun peran pemerintah terkait fasilitas kemitraan dan pelatihan dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM seperti menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan SDM kreatif, termasuk keterampilan digital dan manajerial.

4. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana sejalan dengan Visi-Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng, yaitu: **"Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan"**. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

selaras dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diuraikan pada Misi ketiga, yaitu: **"Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim"**.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam penanggulangan bencana, oleh karenanya pembentukan pranata hukum dalam bentuk peraturan daerah terkait penyelenggaraan Penanggulangan bencana akan menjadi acuan operasional yang mengikat bagi seluruh stake holder, memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan. Pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada kebutuhan akan pedoman hukum yang terperinci untuk menghadapi bencana, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana akan diatur secara khusus dalam peraturan daerah ini.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang secara garis besar dimulai dari membentuk dan mengkoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyusun kebijakan dan rencana penanggulangan, memastikan anggaran serta sumber daya tersedia, mengkoordinasikan upaya pencegahan dan mitigasi, melaksanakan tanggap darurat seperti evakuasi dan bantuan, serta memimpin pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kehadiran perda memastikan adanya kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah termasuk semua pemangku kepentingan lainnya, untuk mengelola risiko bencana secara efektif, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun ketangguhan daerah guna meminimalkan dampak kerugian serta melindungi masyarakat.

D. IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal dalam hal kemudahan layanan digital seperti layanan perizinan, akses informasi

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

dan fasilitas pemerintah, program bantuan, dan peluang usaha berbasis platform online.

Implikasi penerapan peraturan daerah ini tercermin dari penyelenggaraan tata kelola SPBE yang disebutkan pada unsur layanan SPBE sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 rancangan perda ini yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi kegiatan di bidang; perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan kinerja pegawai, serta layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan pada penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik yang merupakan kewenangan daerah meliputi; pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian dan perikanan, transportasi dan perhubungan, usaha mikro, sosial, olahraga, serta perizinan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberi dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat, seperti terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta menyediakan panduan yang jelas untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. RPPLH juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan pelibatan dalam pengelolaan lingkungan.

Manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari adanya peraturan daerah ini antara lain peningkatan kualitas hidup, oleh karena RPPLH bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni oleh masyarakat terutama generasi mendatang. Dengan adanya rencana pengelolaan, sumber daya alam seperti air bersih dan tanah subur akan lebih terkelola, memastikan ketersediaannya bagi masyarakat saat ini dan masa depan. Selain itu RPPLH berperan dalam membantu meminimalkan dampak negatif dari aktifitas manusia, seperti polusi dan kerusakan lingkungan lainnya, yang secara langsung mempengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Peran RPPLH dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat akan nampak dari peningkatan kesadaran dan pendidikan, dorongan kolaborasi dan koordinasi, serta jaminan hak masyarakat. Melalui RPPLH, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran dan

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga serta berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama melindungi lingkungan. Dalam hal jaminan masyarakat, RPPLH mengakui hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Penerapan peraturan daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan potensi daerah. Perda ini menciptakan kepastian hukum, memfasilitasi kolaborasi, serta mendorong inovasi dan daya saing produk kreatif lokal.

Perda ini nantinya akan berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal dengan mengembangkan industri-industri kreatif yang berkontribusi pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) daerah. Dengan hadirnya berbagai kegiatan dan industri kreatif, banyak lapangan kerja baru tercipta, yang secara langsung membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan ekonomi kreatif yang difasilitasi melalui peraturan daerah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan peluang usaha. Selain itu perda ini akan memberikan dukungan terhadap inovasi dan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif, maupun dukungan terhadap promosi potensi daerah melalui berbagai kanal kreatif seperti fotografi, video, dan festival sehingga menarik wisatawan dan investor.

Selain dampak positif dari penerapan perda ini, terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian karena bisa menghambat pengembangan ekonomi kreatif seperti keterbatasan infrastruktur pada sebagian daerah, kesiapan sumber daya manusia, dan ketergantungan pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat besar dan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, dan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, dapat

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

membentuk sistem penanggulangan bencana yang kuat, sehingga akan lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat dengan mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Perda tersebut mengatur hak dan kewajiban masyarakat, serta partisipasi organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial. Tujuannya adalah memberikan perlindungan menyeluruh, meminimalkan dampak bencana, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta menumbuhkan kemitraan publik dan swasta.

E. PENYESUAIAN BATANG TUBUH DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERDA

Pelaksanaan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perda bersama Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah, pelaksanaaan konsultasi publik, serta kegiatan koordinasi dan pengharmonisasian rancangan perda pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan daerah inisiatif DPRD dalam bentuk pengkajian yang komprehensif. Bahwa proses legal drafting tersebut menghasilkan catatan dan saran perbaikan seperti penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koreksi pada sistematika penyusunan, dan perubahan redaksi materi muatan rancangan perda, maupun perubahan pada nomenklatur/judul rancangan perda. Pada kegiatan koordinasi dan pengharmonisasian rancangan perda yang dilaksanakan di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan diperoleh kesamaan persepsi terkait perubahan judul pada rancangan perda, yakni Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan menjadi **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055**.

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya

Pendapat tenaga Ahli DPRD bidang hukum, saran dan pendapat pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng, maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lain yang selaras dengan rancangan perda ini, dapat dijadikan bahan komparasi dan penyelarasan pada materi muatan Rancangan Perda.

Demikian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 13 Oktober 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

1.	HAERUDDIN TAHANG, S.E	**KETUA**
2.	HADI WIJAYA ISMAIL, S.P	**WAKIL KETUA**
3.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS (bukan Anggota)
4.	H. ISMAIL	ANGGOTA
5.	DR. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si	ANGGOTA
6.	Hj. INSANA, S.Pd. SD	ANGGOTA
7.	KAMARUDDIN, S.E., M.Si	ANGGOTA
8.	ANDI DEWI AYU LESTARI	ANGGOTA
9.	A. MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA
10.	SYAHRIR, S.E	ANGGOTA

BAPEMPERDA
Ketua,

HAERUDDIN TAHANG, S.E

ARSIP DPRD KAB. SOPPENG

Diautentikasi pada 12/10/25
oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya